

Kontribusi Dakwah Struktural dan Dakwah Kultural dalam Pembangunan Kota Palopo

Syahrudin; syahrudin.mhi@gmail.com; IAIN Palopo

Abstract

Development strategy applied in Palopo is based on the spirit of religion, local wisdom, and geographical position of the city. Such strategy is represented on the seven dimensions of Palopo's development strategy, namely: religion, education, health/sports, traditions and culture, trade, industry, and tourism. The contribution of Da'wa towards the development of Palopo is quite significant as structural Da'wa is implemented by Municipal Government, the Ministry of Religious Affairs in Palopo, Socio-religious Organizations, and Police Department. In addition to structural da'wa, cultural da'wa is also applied by Socio-religious Organizations in cooperation with traditional-indigenous organizations in the city. The implementation of both structural and cultural da'wa has made people in Palopo love the beauty, tranquility, safety, and hospitality of their city that is built according the principle of Madinah society. There are both internal and external hinderances on the way of da'wa in Palopo. Internal obstacles consist of the diversity of Islamic school of teachings that lead to a conflicting image of moderate vs extreme and substantial vs symbolic teachings of Islam. External onstacles, on the other side, consist of radical understandings and practices of Islamic teachings, negative impacts of information coming from social media, and globalization.

Keywords: Da'wa, development, and Palopo.

Abstrak

Strategi pembangunan Kota Palopo dilandasi semangat religi, kearifan lokal dan posisi geografis Kota Palopo. Hal tersebut tergambar dalam 7 dimensi strategi pembangunan Kota Palopo, yaitu: religi, pendidikan, olah raga/kesehatan, adat dan budaya, perdagangan, industri, dan pariwisata. Kontribusi dakwah dalam pembangunan Kota Palopo terlihat pada dakwah struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, Kementerian Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, dan Kepolisian. Dakwah kultural juga dilakukan oleh Organisasi social keagamaan bekerjasama dengan lembaga-lembaga adat. Dakwah struktural dan kultural yang dilakukan itu menghasilkan masyarakat Palopo yang mencintai keindahan, damai, aman dan nyaman bagi semua, sesuai prinsip-prinsip masyarakat Madinah. Hambatan-hambatan dakwah secara internal adalah keragaman faham keislaman yang berkonsekuensi beragamnya pula titik penekanan dakwah sehingga terkesan saling berseberangan antara yang moderat dan ekstrim, simbolik dan substantif. Tantangan secara eksternal adalah keberadaan faham radikal, dampak negatif informasi yang berasal dari media sosial, dan globalisasi.

Kata Kunci: Dakwah, Kota Palopo, dan Pembangunan Kota.

A. Pendahuluan

Kota Palopo adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu. Sebelum pemekaran, Palopo dikenal sebagai pusat kekuasaan dan pemerintahan sejak dari Kedatuan Islam Luwu hingga terbentuknya Kabupaten Luwu. Hubungan antara Luwu dan Palopo, dengan demikian, bagaikan hubungan anak dengan Ibu.¹ Luwu telah melewati sejarah panjang dan salah satu produk dari sejarah yang panjang itu adalah lahirnya Palopo yang semula merupakan pusat kedatuan Luwu setelah dipindahkan dari Pattimang, menjadi ibukota Kabupaten Luwu, kemudian menjadi daerah otonom.

Kehadiran Islam mempengaruhi tatanan sosio-kultural dan sosio-politik di kedatuan Luwu. Islam dapat diterima dengan relatif mudah berkat dakwah yang dilakukan Datok Sulaiman Khatib Sulung yang sangat akomodatif dan adaptif terhadap institusi kedatuan yang sudah mapan. Hal ini tergambar dalam dialog yang berlangsung antara Datok Sulaiman dengan Makdika Bua (Tandipau) yang terkenal dengan istilah *Singkarume*.² di mana tema dakwah hanya terfokus pada upaya mengenalkan Islam yang dapat memperkuat kebudayaan. Hal ini mencerminkan bahwa Islam disiarkan dengan cara damai sebab para da'i yang menyiarkan Islam tidak berada di ruang hampa melainkan berada di tengah masyarakat yang sudah berbudaya. Oleh karena itu, sikap Islam terhadap budaya lokal yang ditemui juga demikian, tidak perang dengan pemusnahan, tetapi melestarikan yang positif dengan penyesuaian di sana-sini dan berangsur-angsur. Artinya, budaya lokal disikapi secara selektif dan kritis.³

Intinya, cara penyebaran Islam di Kerajaan Luwu lebih bersifat lunak dan damai.⁴ Hasil dakwah seperti ini berupa salah satu subkultur Islam Nusantara yang pada satu sisi menimbulkan misinterpretasi dan distorsi karena menganggap

¹ Bachtiar Adnan Kusuma, ed., *H.P.A. Tenriadjeng, dedikasi tiada henti: 3 tahun berjuang & menuai Kota Palopo* (Jakarta: Yapensi, 2006), 1.

² Siodja Daeng Mallonjo, *Kedatuan Luwu: Catatan tentang Sawerigading, Sistem Pemerintahan dan Masuknya Islam*, 2 ed. (Palopo: Komunitas Sawerigading, 2008), 74.

³ Bustanuddin Agus, *Islam dan Pembangunan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 151.

⁴ Mattulada, "Islam di Sulawesi Selatan," dalam *Agama dan Perubahan Sosial*, ed. oleh Taufik Abdullah, 2 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 229.

masyarakat muslim di wilayah tersebut berada di luar pusat atau tidak termasuk kategori “tradisi besar” (*the great tradition*) Islam dan seolah-olah menjadi “Islam pinggiran” yang berbeda dengan Islam di pusat (timur Tengah) yang murni dan terbaik.⁵

Dari perspektif sosio-religius, sejak menjadi pusat kedatuan Luwu hingga menjadi ibukota Kabupaten Luwu, Palopo tetap menjadi pusat dakwah di kawasan Luwu Raya dengan beberapa alasan antara lain: *Pertama*, Palopo sebagai pusat pemerintahan kedatuan Luwu adalah tempat bermukimnya *Qadi* (Kali) sebagai pemegang otoritas tertinggi bidang keagamaan. *Kedua*, setelah kedatuan Luwu menjadi Kabupaten, pusat pemerintahannya tetap di Palopo.

Dari sudut pandang warisan budaya berupa nilai-nilai luhur, kedatuan Luwu mewariskan ajaran-ajaran dan nilai-nilai luhur berupa “*Adele*’ (adil), *lempu* (jujur), *tengeng* (benar) dan *getteng* (tegas) yang merupakan warisan dari Batara Guru, Batara Lattu dan Sawerigading”.⁶ Ajaran dan nilai luhur tersebut amatlah penting dilestarikan, disosialisasikan dan diinternalisasikan, baik oleh pemimpin pemerintahan, lembaga-lembaga adat kedatuan, Datu dan seluruh perangkatnya hingga ke level bawah, organisasi sosial keagamaan maupun masyarakat karena nilai-nilai luhur tersebut tetap relevan hingga sekarang dan semuanya sesuai dengan ajaran Islam, tuntutan hak asasi manusia dan harapan neo-modernitas atau neo-tradisionalitas.

Mengingat pentingnya peran Islam di Kota Palopo, dimensi religius dari strategi pembangunan kota Palopo menuntut peran dan kontribusi dakwah. Tanpa dakwah, pembangunan dimensi religius ini akan terkendala dan bahkan mungkin tidak akan terwujud. Dakwah, di satu sisi bersumber dari wahyu dan sunnah Rasul yang berdimensi ilahiyah, di sisi lain juga merupakan sebuah bentuk rekayasa sosial yang berdimensi keduniawian. Dakwah adalah suatu rekayasa sosial untuk membentuk suatu persekutuan budaya yang para anggotanya mentaati kerangka

⁵ Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramedia, 2002), 66.

⁶ Darmawan Mas’ud Rahman, “Identitas Budaya Luwu: Tinjauan Ringkas,” dalam *Kedatuan Luwu: Perspektif Arkeologi, Sejarah, dan Antropologi* (Makassar: Lembaga Penerbitan UNHAS, 2000), 50.

ide dan nilai-nilai yang bersumber dari al-Qur'an untuk membentuk kehidupan yang harmonis dan menghindari terjadinya anarki.⁷

B. Hakikat Dakwah

Identifikasi kata dakwah dalam al-Qur'an telah dilakukan oleh para ahli, baik peneliti masalah dakwah maupun penulis kamus. Moh. Ali Aziz merangkum temuan sejumlah penulis terkait istilah dakwah dalam al-Qur'an dan menyatakan bahwa kata dakwah dalam berbagai bentuknya ditemukan 198 kali oleh Muhammad Sulthon, 299 kali menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi', dan 212 kali menurut Acep Muhiddin. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an mengembangkan makna dari kata dakwah dalam berbagai penggunaannya.⁸ Apabila dakwah dalam arti ajakan kepada kebaikan, maka subyeknya pasti dari Allah, para malaikat, para nabi dan Rasul serta para pewarisnya seperti kaandungan ayat-ayat tersebut. Sebaliknya, apabila dakwah dalam pengertian ajakan kepada keburukan, maka sudah pasti subyeknya adalah Iblis, Syaitan, orang kafir, munafik dan orang-orang fasik.

Hal ini seperti yang bisa dilihat, misalnya, dalam QS Yusuf ayat 33.

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ
إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku Termasuk orang-orang yang bodoh."⁹

Dari segi pendapat para ahli, pemahaman dakwah sudah pasti beragam sesuai sudut pandang mereka masing-masing. Dari segi terminologi, misalnya, A.

⁷ Muhammad Sulthon, *Menjawab Tantangan Zaman: Desain Ilmu Dakwah, Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 142.

⁸ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah, Edisi Revisi*, 3 ed. (Jakarta: Kencana, 2012), 6.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 228.

Hasjmy berpendapat bahwa dakwah Islamiyyah yaitu mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan aqidah dan syariah Islamiyah yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri.¹⁰ Pandangan ini menonjolkan kewajaran dan keteladanan keteladanan seorang da'i. Ahli lain, M. Arifin, mengatakan dakwah ialah suatu kegiatan ajakan, baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun secara kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama sebagai *message* yang disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur-unsur paksaan.¹¹ Dalam pengertian tersebut ditekankan pada penggunaan media, lisan dan keteladanan yang terprogram dalam rangka penyadaran *mad'u* secara perorangan maupun kelompok.

Di Indonesia, kajian tentang dakwah dapat ditemui dalam penelitian-penelitian yang membahas topik seputar masyarakat muslim pada masa setelah islamisme. Kajian tersebut berkaitan dengan proses dakwah yang menyasar kelompok masyarakat muslim perkotaan seiring dengan menjamurnya paham keislaman di tengah masyarakat. Meski demikian, kajian tentang dakwah sebagai sebuah fenomena transisi pengetahuan agama biasanya sering didapati pada penelitian-penelitian yang melibatkan media massa.¹²

Adapun tujuan dakwah Islamiyah secara khusus, yaitu mengajak umat manusia yang sudah memeluk Islam agar selalu meningkatkan taqwanya kepada Allah Swt. Artinya, umat Islam diharapkan agar senantiasa mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala hal yang dilarangoleh Allah, membina mental agama (Islam) bagi kaum yang masih muallaf, mengajak manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah (memeluk agama Islam), dan mendidik

¹⁰ A. Hasjmy, *Dustur Dakwah menurut al-Qur'an*, 2 ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 18.

¹¹ Arifin, *Psikologi Dakwah*, 2 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 6.

¹² Diajeng Laily Hidayati dan Ida Suryani Wijaya, "Islamic Expressions On The Culprits Of Islamic Centers In East Kalimantan," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 13, no. 1 (2019): 1-13.

dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya.¹³ Dengan demikian, hakikat dari dakwah Islamiyah adalah mengembalikan fitrah manusia kepada asal kejadiannya, sebab Islam diturunkan sesuai dengan fitrah manusia, membimbing fitrah yang menyimpang. Kajian tentang tujuan dakwah sebagai manifestasi perintah amar ma'ruf nahi mungkar juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayati tentang peran Daiah di kalangan anak muda Kota Samarinda.¹⁴

C. Metode-Metode Dakwah

Dalam bahasa Indonesia kata tersebut mengandung arti "cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yangersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan".¹⁵ Beberapa ayat al-Qur'an yang memberi petunjuk berkenaan dengan metode dakwah di antaranya adalah metode komparatif antara yang baik dan buruk atau antara syurga dan neraka, dialog dengan memberi jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh umat pada masanya, pengutaraan kisah (sejarah) para Nabi dan Rasul serta umat terdahulu, metode *al-hikmah*, *al-mau'idah*, dan *al-mujadalah*.¹⁶

D. Kontribusi Dakwah dalam Membangun Masyarakat Kota Palopo

Sebagaimana dipahami bahwa dakwah struktural adalah dakwah yang dilakukan dengan kekuasaan yang dalam konteks Indonesia dilakukan melalui kebijakan pemerintah yang menjadi tugas pokok dan fungsi kementerian Agama mulai dari pusat hingga ke daerah.

Dakwah struktural berkaitan erat dengan hubungan antara negara dan agama. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga paradigma tentang hubungan agama dan Negara atau Islam dan politik yaitu: *pertama*: Paradigma *integrated*,

¹³ Abd. Rosyad Saleh, *Manajemen Da'wah Islam*, t.t., 55–58.

¹⁴ Diajeng Laily Hidayati, Ida Suryani Wijaya, dan Miftahur Ridho, "Gender Mainstreaming in Da'wa: Study on the Role of Female Preachers in Samarinda," dalam *Proceedings of International Conference on Da'wa and Communication*, vol. 1, 2019, 430–437.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 649.

¹⁶ H. M. Iskandar, *Pemikiran Hamka tentang Dakwah* (Makassar: PPIM, 2001), 281.

memyakini tidak ada dikotomi agama dan Negara, Islam dan politik. Politik dan kekuasaan masuk wilayah agama. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan Negara dilaksanakan atas dasar kedaulatan “Ilahi” karena memang kedaulatan bersumber dan berada di tangan Tuhan.¹⁷ Pada paradigma tersebut, dakwah dilaksanakan secara mapan atas dukungan kekuasaan, ekonomi dan politik atau disebut dengan dakwah structural. Golongan ini ingin mendirikan kekuasaan dan Negara berdasarkan syari’at Islam atau biasa disebut kekuasaan dengan sistem khilafah.

Dakwah struktural dalam paradigma pertama bercita-cita mewujudkan Islam sebagai ideologi negara, nilai-nilai Islam mengejawantah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dengan struktur sosial, politik dan ekonomi dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mewujudkan Islam sebagai ideologi negara. Dakwah belum dikatakan berhasil kalau syari’at Islam belum menjadi konstitusi negara.¹⁸ Ramli Ridwan sebagaimana dikutip oleh Abdullah menyatakan bahwa dakwah struktural adalah seluruh aktifitas negara atau pemerintah dengan berbagai strukturnya untuk membangun tatanan masyarakat yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya dalam bingkai amar ma’ruf nahi munkar.¹⁹ Bentuk dakwah seperti ini tentu tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia sebab sudah menjadi konsensus para *founding father* bangsa bahwa negara berdasar Pancasila dan UUD 1945, negara Indonesia berdasar ketuhanan, tetapi bukan negara agama.

Kedua, paradigma *symbiotic* yaitu agama dan Negara atau Islam dan politik berhubungan saling menguntungkan, sebab agama memerlukan perlindungan dan perkembangan melalui kekuatan dan kekuasaan negara, sementara Negara memerlukan legitimasi dan bimbingan etika serta moral agama.²⁰ Sejalan dengan pandangan ini, al-Mawardi²¹ menyatakan:

¹⁷ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat madani*, 2 ed. (Jakarta: Lagos, 2002), 58.

¹⁸ Mohammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 29.

¹⁹ Abdullah, *Dakwah Kultural dan Struktural: Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah Hamka dan M. Natsir* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 34.

²⁰ Abdullah, 60.

²¹ Al-Mawardi, *Ahkam al-Sultaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 5.

الامامة موضوع الخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

Maksudnya, Imamah penting untuk dilembagakan sebab secara institusional karena Imamah berfungsi untuk menggantikan kenabian atau nubuwah dalam rangka melindungi agama karena agama memerlukan perlindungan kekuasaan dan juga sekaligus mengatur kehidupan dunia. Dalam pandangan simbiotik ini, kekuasaan dan politik bukanlah masuk wilayah pokok agama, akan tetapi merupakan aspek ijthadi. Oleh karenanya, dakwah dalam masyarakat seperti ini adalah dakwah struktural terbatas dan dakwah kultural sekaligus.

Ketiga, paradigma sekularistik yang bertolak belakang dengan kedua paradigma yang dikemukakan sebelumnya, yaitu *paradigm integrated* dan simbiotik. Bagi pihak yang berpegang pada pemahaman ini menolak dengan tegas jika negara didasarkan pada Islam atau mengakui adanya satu bentuk negara formal yang diakui Islam. Oleh karenanya, mereka memahami bahwa Islam tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sistem politik dan kenegaraan.²²

Pelaksanaan dakwah di Indonesia umumnya dan di Kota Palopo khususnya terjadi dalam bentuk dakwah struktural maupun kultural. Dakwah struktural yang dimaksud di sini tidak identik dengan dakwah yang dicita-citakan oleh sebagian umat Islam, di mana negara berdasar hukum syari'at Islam, melainkan dakwah struktural dalam arti pelaksanaan dakwah berkaitan dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Juga kebijakan langsung dari pemerintah karena memandang bahwa legitimasi kebijakan pemerintahannya akan lebih kuat bila didukung oleh agama, termasuk dalam kewenangan otonomi daerah dapat mengambil agama dan budaya lokal sebagai salah satu pilar pembangunan daerah.

Penerimaan terhadap kedatangan Islam di beberapa daerah di nusantara paling tidak memperlihatkan dua pola, yaitu: *Pertama*, Islam pertama diterima oleh masyarakat bawah, kemudian berkembang dan akhirnya diterima oleh kalangan elite kerajaan. Pola seperti ini dikenal dengan istilah *botton up*. Kedua

²² Al-Mawardi, 62.

yaitu pola *top down* yang dilakukan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kedatuan Luwu dilakukan secara *top down* yaitu dimulai dari elite penguasa kerajaan atau bermula dari keraton di mana Raja/Datu yang pertama menerima Islam baru disosialisasikan kepada rakyat atau kalangan bawah. Menurut para sejarawan, penerimaan Islam di Sulawesi Selatan,²³ dan khususnya di kedatuan Luwu melalui pola kedua di mana Datu menerima Islam, baru diikuti oleh rakyat. Cara seperti ini kemudian dikenal dengan istilah dakwah struktural yaitu dakwah yang dilakukan melalui kekuatan elite penguasa kerajaan/keraton.

Kota Palopo sebagai salah satu pewaris sejarah dan wilayah kedatuan Luwu tetap melestarikan nilai-nilai peradaban dalam pelaksanaan dakwah struktural. Memang diakui bahwa dakwah dengan dukungan kekuasaan dan kekuatan politik sangat efektif dalam diterlaksana pada hal-hal tertentu karena berkaitan dengan kebijakan. Beberapa contoh kebijakan pemerintah Kota Palopo pada masa Wali Kota H.P.A. Tenriadjeng di bidang keagamaan yang sekaligus berperan sebagai bentuk dakwah struktural antara lain adalah:

- a. Walikota menginstruksikan kepada semua pegawai untuk menghentikan kegiatan kantor pada waktu shalat, sekaligus shalat berjamaah di Masjid yang berdekatan dengan kantor atau masjid/mushalla kantor bagi pegawai yang muslim/muslimah. Kebijakan tersebut tentu menjadi salah satu bentuk perwujudan dari aspek religi yang merupakan dimensi utama dari 7 dimensi strategi pembangunan Kota Palopo.²⁴ Shalat berjamaah di Masjid/Mushalla menunjukkan kesemarakan nuansa religi bagi para pegawai yang beragama Islam dan untuk rumah-rumah ibadah sekaligus.
- b. Kebijakan selanjutnya dari Walikota Palopo adalah pegawai yang memenuhi syarat menduduki suatu jabatan, harus terlebih dahulu melalui tes bacaan al-Qur'an, sehingga calon pejabat termotivasi belajar membaca al-Qur'an. Bahkan ada calon pejabat yang sebelumnya sama sekali belum bisa membaca al-Qur'an, pada akhirnya dengan adanya kebijakan tersebut, yang

²³ H. Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII)* (Jakarta: Obor, 2005), 86.

²⁴Herawan S.Toni, Staf Humas Pemkot Palopo, "wawancara" di Palopo pada tanggal 11 Mei 2019

bersangkutan bisa membaca al-Qur'an.²⁵ Kemampuan membaca al-Qur'an bukanlah syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menduduki suatu jabatan, tetapi pemerintah Kota Palopo melakukannya sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai pemimpin, terutama untuk mendukung terwujudnya suasana religi yang memang salah satu pihak yang menjadi pionirnya adalah pionirnya adalah pejabat pemerintah. Jadi kewajiban seorang muslim untuk mampu membaca al-Qur'an boleh jadi terabaikan, tetapi berkat kekuasaan yang ada pada perintah pimpinan, maka kewajiban tersebut dapat terwujud.

- c. Walikota Palopo membentuk Unit pengumpul Zakat, infaq dan sadaqah (UPZ ZIS) di setiap instansi/kantor dengan maksud dan tujuan agar para pegawai menunaikan kewajiban membayar zakat bagi pegawai yang telah memenuhi syarat dan anjuran agama untuk bersedekah bagi yang belum mampu berzakat, sekaligus memperlancar sumber dana BAZNAS Kota Palopo.²⁶

Kebijakan pemerintah kota Palopo tersebut untuk hal-hal tertentu, tentulah lebih efektif dibanding himbauan-himbauan para ustaz/muballig di mimbar-mimbar, podium, khutbah, ceramah. Jadi bukan saja dalam hal kebijakan pemerintahan para pegawai taat kepada pemimpin, tetapi dalam masalah menjalankan perintah maupun anjuran keagamaan pun, mereka taat pada pemimpinnya. Di sinilah terbukti hadis Rasulullah saw tentang kekuatan pemimpin dalam hal pencegahan kemungkaran dan penegakan kebenaran yang ditempatkan pada posisi pertama mendahului posisi tablig dan do'a seperti sabda beliau:

²⁵ H.Baso Sulaiman, Kabag Kesra Kota Palopo, "Wawancara" di Palopo tanggal 13 Januari 2011

²⁶ H.Baso Sulaiman, Kabag Kesra Kota Palopo, "Wawancara" di Palopo tanggal 13 Januari 2011

عن ابوسعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راي منكم
منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسا نه فان لم يستطع فبقلمه وذلك اضعاف
الايمان رواه مسلم²⁷

Artinya:

Dari Abu Said berkata aku dengar Rasulullah saw bersabda “Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya, jika tidak mampu, hendaklah mencegah dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman.

Kebijakan wali kota selanjutnya, yakni masa pemerintahan H. Judas Amir dalam bidang keagamaan antara lain:

- a. Program sertifikat gratis untuk rumah-rumah ibadah, terutama masjid. Dasar dari kebijakan ini adalah adanya indikasi menjadikan masjid aset pemerintah menjadi milik pribadi dan kelompok sehingga semua rumah ibadah harus mempunyai sertifikat. Perintah Kota Palopo menyadari bahwa pengurusan sertifikat masjid sebagaimana rumah dan bentuk epemilikan lainnya butuh biaya yang cukup besar, maka pemerintah Kota membantu dalam bentuk menggratiskan biayanya, bahkan yang sudah mengurus sertifikatnya diganti biayanya.²⁸ Selain itu, dikhawatirkan pada masa-masa akan datang, masjid yang tidak mempunyai sertifikat sangat rentan menjadi persoalan, bisa dari ahli waris menggugat tanah yang diwakafkan orang tuanya dahulu, atau pihak lain yang cerdik mencari celah hukum dan kekurangan status tanah wakaf.
- b. Pencabutan izin operasional tempat hiburan dan Kafe di lokasi pantai Lambombo dengan pertimbangan meresahkan masyarakat sekitar, melanggar fungsi dan telah habis masa operasionalnya. Selain itu usulan dari Kapolres

²⁷ Abu Husain bin Hajjaj al-Qususairi al-Nasaburi, *Shahih Muslim Kitab Iman* (Bairut-Libnan: Darul Fikri, 1993), h. 40

²⁸ H.M. Judas Amir, Walikota Palopo “Wawancara” di Kantor Walikota Palopo tanggal 28 Mei 2019

Palopo, Majelis Ta'lim dan masyarakat agar tempat hiburan dan kafe tersebut ditutup oleh pemerintah kota Palopo. Pencabutan izin operasional tempat hiburan dan Kafe tersebut tentu menjadi sebuah dilemma dan pilihan sulit. Sebab satu sisi tempat hiburan tersebut menjadi salah satu sumber pajak pendapatan daerah yang cukup besar dan tempat penyerapan tenaga kerja, akan tetapi pada sisi lain juga menjadi sumber ketidak nyamanan masyarakat.²⁹ Pencabutan izin fungsi dan pengoperasian tempat hiburan dan Kafe di Pantai Labombo dilakukan oleh Pejabat Walikota Palopo, Andi Arwin Aziz, meskipun para pengusaha tempat hiburan dan Kafe menyodorkan izin dan rekomendasi dari Menteri Perdagangan, namun pemerintah Kota Palopo tetap pada keputusan mencabut izin tersebut.³⁰

Kemudaran yang timbul dari tempat hiburan tersebut antara lain keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar sangat terganggu oleh ulah pengunjung yang sudah mabuk, suara musik sampai larut malam dan tempat pemicu terjadinya beberapa kasus pembunuhan, membuktikan bahwa mudarat yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibanding manfaat berupa lapangan pekerjaan dan pajak pendapatan yang masuk ke kas daerah. Di sinilah arti penting kekuatan dan kekuasaan yang ada pada pemerintah.

Perhatian Walikota Palopo terhadap pendidikan keagamaan, khususnya untuk perluasan kampus IAIN Palopo, Walikota berkomitmen mewujudkan tukar guling lokasi SMPN 8 dengan tanah yang berlokasi di dekat SMAN 4. Palopo. Walikota mengatakan dana pembelian lokasi baru sudah siap, tetapi status tanah belum selesai. Menurut Walikota Palopo, meskipun IAIN secara struktural adalah vertikal, namun ada panggilan moral sebagai seorang muslim dan pemimpin daerah berkomitmen mewujudkan tukar guling lokasi tersebut sudah bulat. Hal tersebut ditandai dengan menyiapkan dana untuk pembelian lokasi yang

²⁹ H.M. Judas Amir, Walikota Palopo “*Wawancara*” di Kantor Walikota Palopo tanggal 28 Mei 2019

³⁰ Herawan S.Toni, Staf Humas Pemkot Palopo, “*wawancara*” di Palopo pada tanggal 11 Mei 2019

dimaksud. Hanya saja penyelesaian pengurusan lokasi di lapangan yang mengalami kendala.³¹

Perhatian Walikota pada bidang keagamaan adalah kesiapannya menyewakan kantor bagi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang baru definitif tetapi belum mempunyai kantor. Untuk penyewaan kantor KUA Kecamatan Sendana, KUA Kecamatan Mungkajang dan Wara Barat. Untuk Kantor KUA Kecamatan Bara yang satu lokasi dengan Masjid Jabal Nur, Walikota menyiapkan tanah untuk pembangunan kantor KUA baru supaya lokasi kantor KUA lama difungsikan untuk pembangunan Masjid, belum terwujud karena ada miskomunikasi dengan pejabat kementerian Agama Kota Palopo.³²

Jajaran Kepolisian Resor Kota Palopo berdasarkan instruksi Mabes Polri melakukan dakwah dalam bentuk “Polisi Santri” yang dilakukan dengan bekerjasama dengan “*Jama'ah Tablig.*” Di antara kegiatan dakwahnya adalah pembinaan ibadah, mengaji, ta'lim, jaulah, khuruj bagi anggota polisi yang muslim. Juga mengajak dan mendidik anak-anak yang terjaring dalam kasus-kasus seperti kenakalan, kejahatan, balapan liar, minuman keras, narkoba. Mereka dibina dalam pendopo walikota dalam kurun waktu tertentu dan akan dikembalikan kepada keluarga jika sudah sadar.³³

Dakwah yang dilakukan oleh Polisi Santri ini termasuk dakwah Struktural karena dilakukan atas perintah Kapolres sebagai tindak lanjut dari instruksi Mabes Polri. Dakwah yang dilakukan oleh polisi ini disambut positif oleh masyarakat sebab selain mendekatkan anak-anak yang bermasalah hukum, juga lewat tangan polisi anak-anak bermasalah didekatkan kepada agama, baik dari segi aqidahnya, ibadahnya, bacaan al-Qur'annya, moral/akhlakunya.³⁴

Dakwah yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa dengan wewenang, kekuatan dan kebijakan pimpinan/pemerintah, pembangunan dalam bidang

³¹ H.M.Judas Amir, Walikota Palopo “*Wawancara*” di Kantor Walikota Palopo tanggal 28 Mei 2019

³² H.M.Judas Amir, Walikota Palopo “*Wawancara*” di Kantor Walikota Palopo tanggal 28 Mei 2019

³³ Ruslan, Anggota Polisi/pengurus Polisi Santri, “*Wawancara*” di Masjid Nurul Hikmah tanggal 3 Agustus 2019

³⁴ Gunawan, Anggota Polisi/Pengurus Santri Polisi, “*Wawancara*” di Palopo, tanggal 3 Agustus 2019

keagamaan dapat terwujud secara maksimal sebab ada faktor kekuatan dan kekuasaan yang memang diperlukan baik oleh pemerintah/lembaga atau instansi maupun oleh umat itu sendiri.

Selain menerapkan dakwah struktural, walikota Palopo juga mendorong terlaksananya dakwah kultural. Dalam hal ini, dakwah kultural adalah aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan Islam secara kultural.³⁵ Salah satu metode dakwah adalah metode dialogis atau *jadal*. Istilah *mujadalah* dijumpai dalam beberapa ayat al-Qur'an yang secara umum dapat dipahami sebagai berdebat, berbantahan, berdialog, berdiskusi dan tanya-jawab. Namun istilah berdebat dan berbantahan tidak digunakan dalam konteks dakwah karena mengandung konotasi negatif yang tidak sesuai dengan substansi dakwah.

Uraian tentang Mujadalah disampaikan oleh Ali al-Jarisah. Menurutnya, *Jidal* atau *mujadalah* dapat dibagi menjadi *jidal mahmudah* dan *mazmumah*. Adapun yang *mazmumah* atau tercela adalah keseluruhan dari persengketaan, perseteruan yang memang bagian dari sifat yang dilarang oleh syariat Islam. Sedangkan *mujadalah* yang mahmudah terbagi dua yaitu:

- a. *Al-Hiwar* (dialog) antara dua orang atau lebih yang setara, antara da'i dan mad'u yang beradu dalil. Nas atau argumentasi.
- b. *As-ilah wa ajwibah* (Tanya jawab) yaitu dua orang atau lebih yang berbeda level pengetahuan dan kecerdasannya sehingga terjadi dominasi satu sama lain, kesannya komunikasi satu arah.³⁶

Metode *bi Allati Hiya Ahsan* (berdebat dengan cara yang baik) atau berdialog dengan baik diharapkan dapat menghasilkan pemahaman, pengetahuan, bahkan keyakinan yang mantap sebab dalam proses dialog, pikiran tercerahkan, jiwa tenang dan perasaan segar. Berkaitan dengan hal tersebut, Hasanuddin menyatakan:

Berbantahan dengan baik yaitu dengan jalan sebaik-baiknya dalam bermujadalah adalah dengan perkataan yang lunak, lemah lembut, tidak

³⁵ Muhammad Sulthon, *Menjawab Tantangan Zaman: Desain Ilmu Dakwah, Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*, 26.

³⁶ Ali al-Jarisah, *Adab al-Hiwar wa al-Munazarah* (Madinah: Dar al-Wifa, 1989), 9.

dengan ucapan yang kasar atau dengan menggunakan perkataan yang dapat menyadarkan hati, membangun jiwa dan menerangi akal pikiran.³⁷

Walikota Palopo selalu menyampaikan bahwa tradisi dialog/diskusi akan dijadikan landasan dalam kebijakan pembangunan karena menurutnya, diskusi dan dialog adalah cara menyelesaikan masalah.³⁸

Dakwah kultural di Indonesia dan di Palopo khususnya sejak semula telah menjadi pilihan yang tepat. Penerimaan Islam pertama di kedatuan Luwu karena cara penyampaian dakwah sangat akomodatif dan adaptif terhadap budaya yang sudah mapan. Oleh karena itulah maka Datok Sulaiman Khatib Sulung ketika menyebarkan Islam memilih bentuk “*Mujadalah*” atau dialog dengan Tandipau, Makdika Bua yang dikenal dengan istilah “*SINGKARUME*”. Di mana dialog tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Luwu saat itu telah memiliki budaya atau peradaban tinggi sehingga Islam yang didakwahkan mengutamakan sikap mengakomodir, mengadaptasi dan menyempurnakan budaya yang sudah ada dengan nilai Islam. Oleh karenanya, di bumi manapun yang didatangi Islam tentu bukanlah ruang hampa budaya melainkan berbudaya dan bahkan berperadaban tinggi, maka sikap Islam terhadap budaya lokal adalah mengakomodir, mengadaptasi budaya itu dengan nilai Islam, meluruskan dan memberi nilai yang masih perlu penyempurnaan dan membersihkan budaya yang berbau syirik, bid’ah, takhyul dan khurafat.

Dalam perkembangannya sentuhan-sentuhan Islam menerobos berbagai aspek budaya sebagai hasil dari dakwah kultural dan dialogis yang secara perdana dimuai oleh Datok Sulaiman. Dalam konteks kekinian, dakwah kultural di Kota Paopo dilaksanakan terutama oleh dua organisasi sosial keagamaan besar yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, meskipun di dalam pengendalian organisasi tersebut dakwah struktural terbatas juga tetap berjalan.

Menyikapi kemajemukan suku, adat istiadat dan budaya masyarakat Palopo yang sangat heterogen, maka dakwah yang dilakukan tetap mempertimbangkan

³⁷ Hasanuddin, *Hukum Dakwah* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 38.

³⁸ H. M. Judas Amir, Walikota Palopo, “Sambutan pada acara abuka Puasa bersama di Kantor Kecamatan Wara Barat” tanggal 5 Agustus 2017

model dakwah seperti yang dilakukan oleh organisasi sosial kemasyarakatan Nahdatul Ulama, yaitu dakwah yang penuh rahmah, dan ramah lingkungan dan dilandaskan pada keyakinan bahwa budaya yang merupakan warisan leluhur banyak yang relevan dengan ajaran Islam. Sebagian dapat diformat ulang lalu disempurnakan dan budaya yang memang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, tentu harus ditinggalkan.³⁹

Sebagai bukti dan contoh sikap adaptif, akomodir budaya ketika Islam telah terintegrasi ke dalam budaya *pangngadereng*, dakwah tidak bermaksud mengubah tatanan adat yang telah mapan, akan tetapi melengkapi atau menyempurnakannya. Pelaksanaan dakwah secara kultural di Kota Palopo memunculkan semboyan yang berbunyi: “*Pattuppui ri ade’e, passanrei ri sara’e, muatangnga ri rapangnge, mupatarattei ri wari’e, mualai pappegau ri pobiasange*” (Sendikan kepada adat, sandarkan kepada syari’at, perhatikan keadaan masyarakat, tertibkan menurut hukum dan bandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan)⁴⁰ Nilai-nilai dasar tatanan masyarakat dan pemerintahan di kedatuan Luwu sebelum Islam yaitu: “*Ade’, Wari’, Rapang’ dan Bicara*” Setelah Islam masuk menjadi bagian integral dengan *pangngadereng*. Dari sini terbentuklah institusi keagamaan yang disebut dengan “*Sara*”. Posisi *Sara’* berada di antara nilai-nilai institusi tersebut adalah sebagai nilai dan sandaran pertama, memproteksi kepercayaan dan moral yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.⁴¹ Meskipun *Sara’* sebagai landasan utama *pangngedereng*, namun dalam realitasnya seringkali tidak dipertimbangkan sebagai landasan etik dan moral.

Muhammadiyah juga tetap mengembangkan tradisi pembinaan latihan kepanduan “*Hizbul Wathan*” dan keterampilan bela diri “*Tapak Suci*”⁴² Kedua lembaga pembinaan ini merupakan wadah dakwah kultural bagi pembentukan dan pewarisan budaya dalam persyarikatan Muhammadiyah.

³⁹ H.Zainuddin Samide, *Ketua Tanfiziyah NU Kota Palopo*, “*Wawancara*” di Palopo, tanggal 17 Maret, 2017.

⁴⁰ Sanusi Daeng Mattata, *Luwu dalam Revolusi* (Makassar: Bhakti Baru, 1967), 66.

⁴¹ H. Syarifuddin Daud, *Ketua Majelis Ulama Kota Palopo*, “*Wawancara*” di Palopo, tanggal 10 Januari 2018.

⁴² Muhammad Tahmid Nur, *Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Palopo*, “*Wawancara*” tanggal 16 Juni 2018

Muhammadiyah Kota Palopo dalam melaksanakan dakwah, selain berkontribusi bersama-sama dengan organisasi sosial keagamaan lainnya seperti Ikatan Muballig Kota Palopo (IMKOP), suatu institusi dakwah sebagai corong pemerintah dalam mensosialisasikan program pembangunan melalui bahasa agama, juga secara institusi lewat bidang Majelis Tablig membentuk Tim melaksanakan dakwah berupa khutbah Jum'at, Sapari Ramadan dan pengkaderan.⁴³

Aktivitas dakwah secara kuantitas dilakukan oleh Jama'ah Tabligh dengan menggunakan metode Nasihat dan bimbingan. Setiap jama'ah berkewajiban meluangkan waktu melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut satu jam dalam seminggu, sehari dalam sebulan atau sebulan dalam setahun.⁴⁴ Hasil dari dakwah Jama'ah Tabligh ini tercermin dari sikap dan perilaku pegawai yang telah mengikuti bimbingan dan nasihat lewat program khuruj yang ramah, simpatik dalam pelayanan tugas di mana mereka bertugas, suatu hal yang berbeda bagi mereka yang belum mengikuti kegiatan *khuruj*.⁴⁵

E. Kesimpulan

Strategi pembangunan Kota Palopo dilandasi nilai sejarah Palopo sebagai pusat dakwah dan Islamisasi di Tana Luwu di mana dakwah kultural dan struktural menjadi faktor yang ikut berperan dalam pembangunan kota. Dalam dakwah kultural, fokus diarahkan pada metode dialog sehingga tercipta harmoni antara nilai agama dan nilai budaya lokal. Dalam dakwah struktural, fokus diarahkan pada upaya pemerintah mendorong tertanamnya nilai-nilai Islam dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Bersama-sama, dua metode dakwah ini diintegrasikan dalam skema besar strategi pembangunan Kota Palopo yang dijabarkan dalam tujuh dimensi pembangunan Kota Palopo, yaitu: dimensi religi sebagai dimensi mayor yang mengayomi dimensi-dimensi berikutnya yaitu:

⁴³ H. Bashori Kastam, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palopo, "Wawancara" di Palopo tanggal 12 Oktober 2016

⁴⁴ Shadiq Amin, *Mencari Format Gerakan Dakwah yang Ideal* (Jakarta: al-Fushom Cahaya Umat, 2006), 79.

⁴⁵ H. Baso Sulaiman, Kepala Kesbangpol-Linmas Kota Palopo, "Wawancara" di Kota Palopo, tanggal 15 Pebruari 2018

Pendidikan yang berkarakter dan berwawasan lokal, nasional maupun universal, dimensi olah raga dan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dimensi adat/budaya dengan prinsip bersandar pada adat dan bersendikan sara', dimensi perdagangan yang adil dan jujur, industri yang ramah lingkungan dan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy. *Dustur Dakwah menurut al-Qur'an*. 2 ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Abd. Rosyad Saleh. *Manajemen Da'wah Islam*, t.t.
- Abdullah. *Dakwah Kultural dan Struktural: Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah Hamka dan M. Natsir*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Ali al-Jarisah. *Adab al-Hiwar wa al-Munazarah*. Madinah: Dar al-Wifa, 1989.
- Al-Mawardi. *Ahkam al-Sultaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Arifin. *Psikologi Dakwah*. 2 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Azyumardi Azra. *Historiografi Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Bustanuddin Agus. *Islam dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Darmawan Mas'ud Rahman. "Identitas Budaya Luwu: Tinjauan Ringkas." Dalam *Kedatuan Luwu: Perspektif Arkeologi, Sejarah, dan Antropologi*. Makassar: Lembaga Penerbitan UNHAS, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- H. Ahmad M. Sewang. *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII)*. Jakarta: Obor, 2005.
- H. M. Iskandar. *Pemikiran Hamka tentang Dakwah*. Makassar: PPIM, 2001.
- Hasanuddin. *Hukum Dakwah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Hidayati, Diajeng Laily, dan Ida Suryani Wijaya. "Islamic Expressions On The Culprits Of Islamic Centers In East Kalimantan." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 13, no. 1 (2019): 1–13.
- Hidayati, Diajeng Laily, Ida Suryani Wijaya, dan Miftahur Ridho. "Gender Mainstreaming in Da'wa: Study on the Role of Female Preachers in Samarinda." Dalam *Proceedings of International Conference on Da'wa and Communication*, 1:430–437, 2019.

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama, 2019.
- Kusuma, Bachtiar Adnan, ed. *H.P.A. Tenriadjeng, dedikasi tiada henti: 3 tahun berjuang & menuai Kota Palopo*. Jakarta: Yapensi, 2006.
- M. Din Syamsuddin. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat madani*. 2 ed. Jakarta: Lagos, 2002.
- Mattulada. "Islam di Sulawesi Selatan." Dalam *Agama dan Perubahan Sosial*, disunting oleh Taufik Abdullah, 2 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Moh. Ali Aziz. *Ilmu Dakwah, Edisi Revisi*. 3 ed. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mohammad Sulthon. *Desain Ilmu Dakwah*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Muhammad Sulthon. *Menjawab Tantangan Zaman: Desain Ilmu Dakwah, Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sanusi Daeng Mattata. *Luwu dalam Revolusi*. Makassar: Bhakti Baru, 1967.
- Shadiq Amin. *Mencari Format Gerakan Dakwah yang Ideal*. Jakarta: al-Fushom Cahaya Umat, 2006.
- Siodja Daeng Mallonjo. *Kedatuan Luwu: Catatan tentang Sawerigading, Sistem Pemerintahan dan Masuknya Islam*. 2 ed. Palopo: Komunitas Sawerigading, 2008.